

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KETAHANAN PANGAN DI PROPINSI SULAWESI UTARA

Denny Valentino Wehantouw¹, Paulus Kindangen², Een N. Walewangko³

dennywehantouw76@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari konsumsi beras, produksi beras dan tingkat kemiskinan pada Indeks Ketahanan Pangan agar dapat berguna sebagai data dasar dalam pengambilan keputusan tercapainya Ketahanan Pangan juga Stabilitas Ekonomi. Dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk mendapatkan informasi data, data tersebut dianalisa menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 22 dengan hasil yaitu produksi beras berpengaruh positif terhadap indeks ketahanan pangan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Konsumsi Beras secara signifikan berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangan, Kemiskinan secara tidak signifikan berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangan dan Secara bersama-sama untuk variabel produksi beras, konsumsi beras dan tingkat kemiskinan terhadap indeks ketahanan pangan memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks ketahanan pangan.

Kata Kunci : Produksi Beras, Konsumsi Beras, Kemiskinan dan Indeks Ketahanan Pangan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of rice consumption, rice production and poverty levels on the Food Security Index so that it can be useful as basic data in making decisions to achieve Food Security as well as Economic Stability. In this study, by collecting secondary data needed to obtain data information, the data were analyzed using multiple linear regression method using SPSS 22 with the result that rice production had a positive effect on the district food security index in North Sulawesi Province, Rice consumption significantly affected the index. food security, poverty has no significant effect on the food security index and together for the variables of rice production, rice consumption and poverty level on the food security index have a significant effect on the food security index.

Keywords: Rice Production, Rice Consumption, Poverty and Food Security Index

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat dunia. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun. Angka pertumbuhan tersebut mencerminkan besarnya tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai ketahanan pangan. Oleh sebab itu pemerintah selalu menempatkan masalah ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam setiap tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini, pencapaian kedaulatan pangan menjadi bagian dari agenda ketujuh Nawa Cita untuk Indonesia.

Ketersediaan pangan merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan konsumsi, namun dinilai belum mencukupi dalam konteks ketahanan pangan, karena masih banyak variabel yang berpengaruh untuk mencapai ketahanan pangan tingkat daerah dan rumah tangga. Melihat juga dari kondisi yang sekarang ini terjadi, yaitu situasi pandemi yang disebabkan oleh Corona virus Disease (Covid-19) yang berdampak pada aspek-aspek penting kehidupan kita baik itu kesehatan dan juga ekonomi yang merujuk pada kebutuhan utama kita sebagai manusia, yakni makanan (pangan).

Sejak menyebarnya Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang tertuang dalam Asumsi Dasar Makro APBN 2020 ditargetkan akan tumbuh 5,3 %, namun terkontraksi akibat pandemi sehingga pada akhir Triwulan IV 2020 tumbuh minus 2,07%. Selanjutnya berdasarkan data BPS, ada 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi ini, dengan rincian : pengangguran karena pandemi sebesar 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena pandemi 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena pandemi sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang. Bahkan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia mencatat hingga saat ini sudah lebih dari 5,6 juta tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dan dirumahkan akibat imbas dari pandemi ini. Kesemuanya ini merupakan gambaran singkat bahwa kondisi di Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan yang nantinya akan berdampak pada terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan pangan. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan di masa pandemi menjadi masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari kita karena berkaitan erat dengan kesehatan yang mana salah satu cara untuk tetap hidup sehat adalah dengan mengonsumsi bahan pangan yang sehat dalam jumlah yang cukup, beragam, seimbang dan bergizi. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dengan menetapkan berbagai kebijakan nasional yang tertuang dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan pangan domestik dalam jumlah besar merupakan konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pengolahan pangan itu sendiri. Ada dua cara untuk mencapai ketahanan pangan yaitu: 1 (1) swasembada pangan dan (2) kecukupan pangan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Pemenuhannya pun telah dijamin oleh Negara. Dengan demikian suatu wilayah

dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat.

Gambar 1
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2020



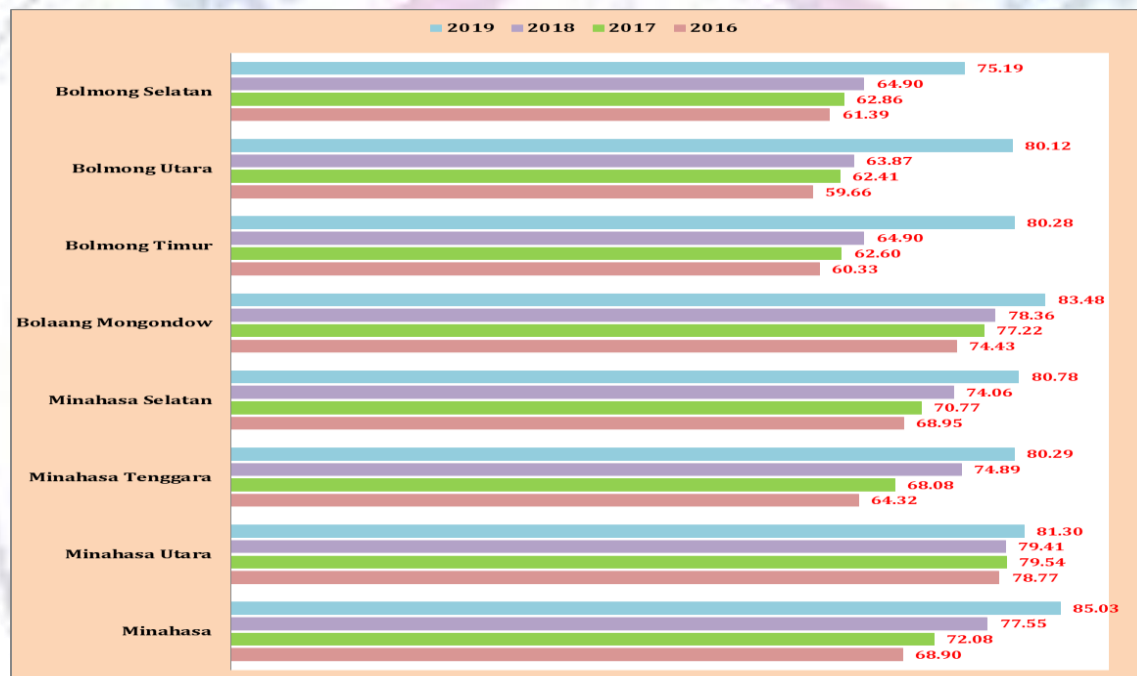
Sumber: sulut.bps.go.id

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan beberapa daerah Kabupaten yang memiliki potensi daerah terutama dalam pemenuhan pangan terhadap masyarakat. Tetapi permasalahan mungkin dapat terjadi pada saat ini, dimana menurut data BPS Sulawesi Utara, dari tahun 2011 hingga 2019 terjadi peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya yang cukup signifikan yaitu rata-rata 1,04% per tahun atau bertambah kurang lebih 25.000 jiwa. Dan untuk tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu naik sebanyak 115.000 jiwa atau 4,39% seperti pada gambar 1.1. Sementara itu tingkat konsumsi pangan masyarakat di Sulawesi Utara adalah lebih tinggi atau berada di atas Angka Kecukupan Energi Ideal sebesar 2.000 kkal/kapita/hari yaitu sebesar 2.021 kkal/kapita/hari dimana kelompok pangan padi-padian (beras) menyumbang energi paling besar yaitu 1.166,9 kkal/kapita/hari (Joseph:2017). Konsumsi yang terlalu tinggi, merupakan salah satu ancaman bila produksi beras menurun akibat perubahan cuaca ekstrim dan bencana alam melanda berbagai daerah penghasil beras.

Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan posisi geografisnya terletak di jazirah utara pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga propinsi di Indoensia yang terletak di sebelah Utara garis katulistiwa dengan memiliki iklim dan kesuburan tanah yang baik untuk berbagai jenis budidaya tanaman tahunan serta untuk tanaman pangan. Dilihat dari kondisi stabilitas ketahanan pangan di Propinsi Sulawesi Utara masih dinilai cukup stabil dikarenakan adanya ketersediaan pasokan beras dimana terdapat 8 (delapan) kabupaten dari total 15 Kabupaten/Kota yang terdapat di Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten

Minahasa merupakan daerah penghasil beras, berikut adanya kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh/mengaksesnya bahan pangan tersebut serta harga beras yang relatif stabil. Di samping itu adanya program pemerintah yang berfokus untuk bercocok tanam demi meningkatkan jumlah produksi kebutuhan pangan (beras). Untuk itulah kondisi kedelapan kabupaten ini, dapat dijadikan acuan yang mewakili kabupaten/kota lainnya untuk mengukur tingkat ketahanan pangan di Propinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data yang di publikasi oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dapat di lihat adanya peningkatan Indeks Ketahanan Pangan dari tahun 2016 sampai dengan 2019, berikut perkembangannya :

Gambar 2
Indeks Ketahanan Pangan 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2016-2019



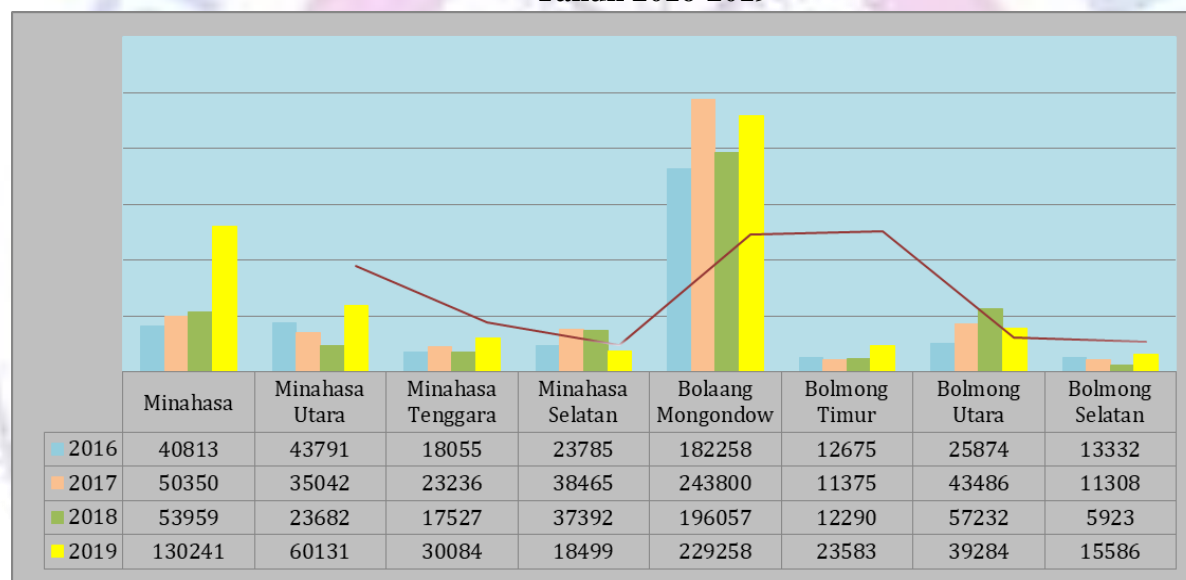
Sumber: *bkp.pertanian.go.id*

Perkembangan indeks ketahanan pangan beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, untuk Kabupaten dengan nilai indeks tertinggi di tahun 2016 adalah Kabupaten bolaang mongondow dengan skor 74,43 persen, di tahun 2017 ada Kabupaten Minahasa dengan skor yang dicapai sebesar 72,08 persen, di tahun 2018 ada Kabupaten Minahasa utara dengan nilai skor 79,41 persen dan di tahun 2019 dengan skor tertinggi di capai oleh Kabupaten Minahasa dengan skor yang di capai 85,03 persen. Peningkatan angka indeks ketahanan pangan yang ada di pegaruhi oleh faktor-faktor lain, diantaranya jumlah produksi dari tanaman pangan seperti beras. Dalam kaitan tersebut, ketahanan pangan lebih diarahkan pada kebutuhan dasar yang terjangkau oleh masyarakat, dalam hal ini diantaranya adalah beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Beras mempunyai peran strategis dalam memantapkan ketahanan

pangan, ketahanan ekonomi, dan keamanan serta stabilitas politik nasional. Oleh sebab itu pasokan dan harga yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata dan dengan harga terjangkau merupakan kondisi ideal yang diharapkan dari komoditi ini.

Namun di sisi lain surplus beras tidak serta merta mencerminkan ketangguhan ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Utara jika kesenjangan antar rumah tangga dalam mengakses pangan tidak tertangani. Dengan demikian peranan pendistribusian bahan pangan juga perlu mendapat perhatian yang serius. Penjualan beras ke konsumen dalam Provinsi Sulawesi Utara bisa melibatkan delapan pelaku mulai dari petani, pedagang lokal, pengusaha RMU, kontraktor (pedagang besar), DOLOG, grosir, pedagang pengecer dalam propinsi dan terakhir konsumen (Sudana. Et al. 2002). Dan untuk data perkembangan dari masing-masing Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam hal produksi beras dapat dilihat dalam grafik pada gambar 3 berikut:

Gambar 3
Produksi Beras 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2016-2019



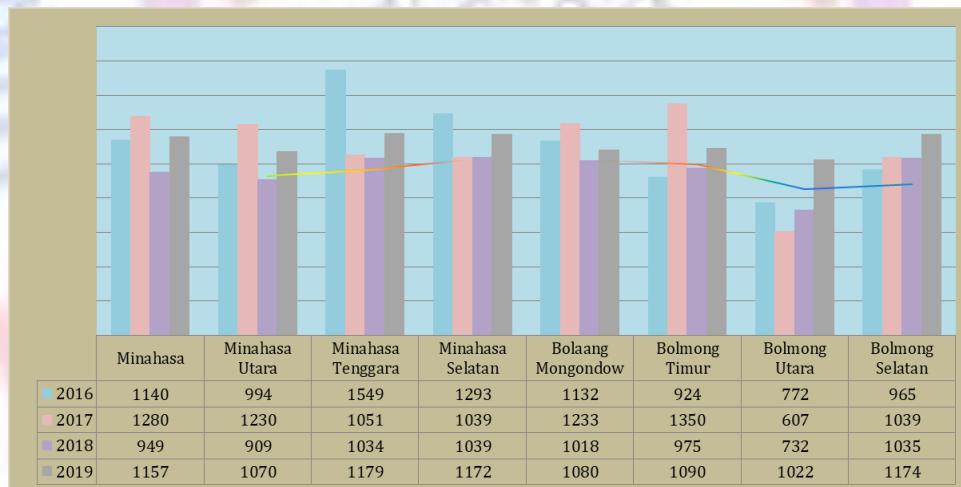
Sumber : Sulawesi Utara dalam angka 2017-2020

Produksi beras di Provinsi Sulawesi Utara khususnya 8 kabupaten penghasil beras mengalami penurunan hasil panen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi padi di Sulawesi Utara pada 2019 diperkirakan sebesar 277,78 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami penurunan sebanyak 49,15 ribu ton atau 15,03 persen dibandingkan tahun 2018. Sementara itu kenaikan produksi padi tahun 2019 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sementara penurunan produksi padi tahun 2019 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara. Dua kabupaten dengan produksi padi GKG tertinggi pada tahun 2018 dan 2019 adalah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Minahasa. Namun, pada 2019 terjadi penurunan produksi pada dua kabupaten tersebut dibandingkan dengan produksi 2018. Data BPS Sulut juga mencatat,

jika produksi padi pada tahun 2019 dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras di Sulawesi Utara pada 2019 sebesar 155,29 ribu ton atau mengalami penurunan sebanyak 27,48 ribu ton atau 15,03 persen dibandingkan tahun 2018. Selain produksi beras ada juga faktor yang mampu mendorong meningkatnya ketahanan pangan diantaranya konsumsi beras.

Konsumsi beras Provinsi Sulawesi Utara khususnya untuk daerah Kabupaten bervariasi, tergantung dari konsumen dalam selera memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi. Pengeluaran untuk konsumsi makanan bagi penduduk masih mengambil bagian terbesar dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Peningkatan proporsi pengeluaran untuk kelompok makanan dapat menjadi indikator menurunnya kesejahteraan penduduk dan meluasnya kemiskinan karena dalam kondisi pendapatan yang terbatas, seseorang akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan sehingga pendapatan yang terbatas, sebagian besar dibelanjakan untuk konsumsi makanan. Konsumsi pangan merupakan gambaran dari aspek ketersediaan dan kemampuan keluarga tersebut untuk membeli dan memperoleh pangan. Dan berikut adalah grafik yang menggambarkan perkembangan konsumsi beras di Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk 8 daerah Kabupaten.

Gambar 4
Perkembangan Konsumsi Beras 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2016-2019



Sumber : Sulawesi Utara dalam angka 2017-2020

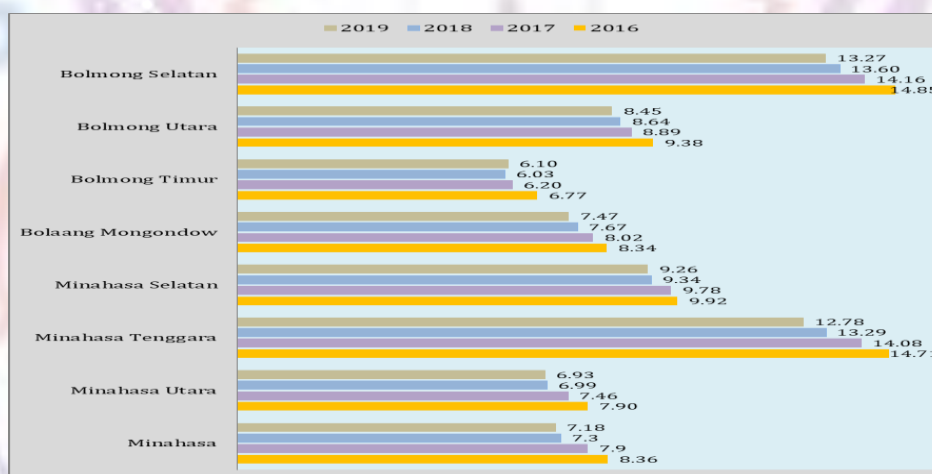
Perkembangan konsumsi beras masyarakat Sulawesi Utara khususnya 8 Kabupaten yang ada didalamnya di tahun 2018 mengalami penurunan, tetapi di tahun 2019 kembali mengalami peningkatan, dan peningkatan konsumsi yang paling menonjol adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan di tahun 2 sebelumnya yaitu 2016 konsumsi beras tertinggi ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Masalah kekurangan konsumsi pangan dan kondisi rawan pangan yang meluas di masyarakat suatu negara menjadi semakin penting untuk dicari penyelesaiannya sehingga peranan pangan menjadi sangat penting dalam proses kehidupan dan pembangunan bangsa. Masalah

kekurangan konsumsi pangan dan rawan pangan ini sebenarnya merupakan masalah yang berulang kali dialami oleh masyarakat dunia sejak dahulu sampai sekarang dan dalam negara yang relatif majupun masih ada penduduk yang rawan pangan, untuk itu berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam hal menjaga kestabilan ketahanan pangan yang ada khususnya di Provinsi Sulawesi Utara guna keberlangsungan hidup masyarakat yang ada dan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Pengeluaran rumah tangga terhadap konsumsi sangat erat kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh rumah tangga tersebut. Pendapatan yang diperoleh dalam suatu rumah tangga mencerminkan tingkat kesejahteraan atau kemiskinan rumah tangga tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidaksejahteraan keluarga dan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan sangat sensitif terhadap faktor harga, penentuan standar minimum kebutuhan dasar, pemilihan jenis paket komoditi, serta karakteristik wilayah.

Kondisi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk daerah Kabupaten memiliki perkembangan dan penurunan presentase angka pada setiap tahunnya berikut di tampilkan dalam grafik berikut:

Gambar 5
Presentase Tingkat Kemiskinan 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2016-2019



Sumber : Sulawesi Utara dalam angka 2017-2020

Grafik presentase perkembangan kemiskinan untuk daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan pada setiap tahunnya, untuk daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di sepanjang tahun 2016-2019 adalah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di ikuti oleh daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan untuk presentase terendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatandan Minahasa Tenggara

mempunyai angka kemiskinan tertinggi dibanding kabupaten kota lainnya. Namun, angka tersebut berfluktuasi dan cenderung menurun. Hingga tahun 2018, 2 (dua) kabupaten ini masih tetap menempati angka kemiskinan tertinggi. Diketahui bahwa 2 (dua) kabupaten ini adalah daerah otonomi baru yang relatif kurang terjamah oleh kabupaten induknya sebelum pemekaran. Sehingga, 2 (dua) kabupaten inipasca dimekarkan menjadi daerah otonomi baru dapat dipastikan memiliki banyak keterbatasan akses karena kurangnya infrastruktur yang memadai, investasi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sarana publik lainnya serta aksesibilitas dalam meningkatkan pendapatan dan mendapatkan lapangan kerja. Oleh sebab itu, kerja keras pemerintah sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan. Dalam menganalisis angka kemiskinan, tidak hanya dilihat dari angka yang tertinggi ataupun yang terendah, karena angka tersebut adalah relatif, tergantung dari start awal pada saat daerah tersebut melaksanakan pembangunan. Kaca mata yang sebenarnya adalah ketika kita membandingkan angka kemiskinan suatu daerah yang setiap tahunnya berangsur-angsur mengalami penurunan dan apabila terjadi shock baik nasional maupun regional, daerah tersebut tetap stabil dan mampu mem-pressure kenaikan angka kemiskinan dengan sekecil-kecilnya. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan fokus pada kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dalam hal penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP ini disusun oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan mengadopsi pengukuran indeks global (*Global Food Security Index – GFSI*) dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilihat pengaruh dari produksi beras, konsumsi beras dan tingkat kemiskinan yang dalam hal ini merupakan tingkat pendapatan terhadap indeks ketahanan pangan. Pemerintah harus mendorong masyarakat untuk memahami dan memaknai, pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan ekonomi nasional, meskipun pemerintah kerap mengklaim Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pada beberapa komoditas pangan tertentu, namun harus diakui pencapaian swasembada belum mantap karena amat riskan digoyang krisis ekonomi.

Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional yang menyebabkan inflasi meningkat sebagaimana tertulis pada penelitian terdahulu dari Widiarsih (2012). Menurut Badan Pusat Statistik Sebagai bahan pangan pokok, beras merupakan penyumbang paling tinggi pada inflasi. Selama 2010, kontribusi beras terhadap inflasi 1,29 persen dari total 6,96 persen. Artinya, beras menyumbang 18,5 persen mendekati 19 persen dari total inflasi.

Berdasarkan latar belakang diatas dimana pentingnya ketahanan pangan pada ekonomi maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari konsumsi beras, produksi beras dan tingkat kemiskinan pada Indeks Ketahanan Pangan di 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang adalah daerah penghasil beras agar dapat berguna sebagai data dasar dalam pengambilan keputusan tercapainya Ketahanan Pangan juga Stabilitas Ekonomi.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh produksi beras terhadap indeks ketahanan pangan di 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi beras terhadap indeks ketahanan pangan di 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap indeks ketahanan pangan di 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama produksi beras, konsumsi beras, dan kemiskinan terhadap indeks ketahanan pangan di 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.

Tinjauan Pustaka

Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai pada perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan dan gizi dilakukan secara sistematis dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kualitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan.

Menurut Oxfam (2001) ketahanan pangan adalah kondisi ketika: “setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. Dua kandungan makna tercantum di sini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun

klaim). Baliwati (2004) menyatakan bahwa ketahanan pangan rumah tangga petani setiap saat memiliki aksesibilitas secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat hidup produktif dan sehat.

Menurut Riyadi (2003), diversifikasi pangan merupakan suatu proses pemilihan pangan yang tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan, akan tetapi memiliki beragam pilihan (alternatif) terhadap berbagai bahan pangan. Pertimbangan rumah tangga untuk memilih bahan makanan pokok keluarga di dasarkan pada aspek produksi, aspek pengolahan, dan aspek konsumsi pangan. Penganekaragaman pangan ditujukan tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan akan jenis pangan tertentu, akan tetapi dimaksudkan pula untuk mencapai keberagaman komposisi gizi sehingga mampu menjamin peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Produksi

Produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi diartikan sebagai aktivitas dalam menghasilkan output dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk mengolah atau memproses input sedemikian rupa (Sukirno:2002).

Produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa, dan dimana atau kapan komoditi-komoditi tersebut dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu (Miller dan Mainers, 2000). Dengan demikian produksi itu tidak terbatas pada pembuatannya saja tetapi juga penyimpanannya, distribusi, pengangkutan, pengeceran, pemasaran kembali, upaya-upaya mensiasati lembaga regulator atau mencari celah hukum demi memperoleh keringanan pajak atau lainnya.

Konsumsi

Perilaku masyarakat membelanjakan sebagian dari pendapatan untuk membeli sesuatu disebut pengeluaran konsumsi. Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan siap pakai (*disposable income*). Dengan kata lain, fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (Prasetyo:2011).

Menurut Rosyidi (2020) Konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa.

Kebutuhan seseorang beraneka ragam, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk pakaian, kebutuhan untuk perawatan dan sebagainya. Berdasarkan kebutuhan yang diperlukan tersebut maka seseorang membeli barang untuk dikonsumsi pun pasti lebih dari satu. Maka terdapat kombinasi barang-barang yang dibelanjakan oleh seseorang. Semua kombinasi dari barang-barang dengan jumlah total uang yang dibelanjakan sama dengan pendapatan disebut garis anggaran (*budget line*) (Pindyck : 2009).

Kemiskinan

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu keadaan seseorang Ketika tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan dan keahlian yang rendah, terkucilkan secara sosial yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

Menurut Kartasasmita (1996) (dalam Sartika dkk:2016) menjelaskan bahwa kemiskinan suatu daerah dapat digolongkan sebagai berikut:

1. *Presistent Proverty*, yaitu kemiskinan yang kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini umumnya merupakan daerah-daerah yang krisis sumber daya alam atau daerah terisolir;
2. *Cyclical Proverty*, yaitu kemiskinan yang meliputi pola siklus ekonomi secara keseluruhan;
3. *Seasonal Proverty*, yaitu kemiskinan musin seperti yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan;
4. *Eccidental Proverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu di daerah yang berakibat pada kesejahteraan suatu masyarakat;

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (1997) (dalam Sartika dkk : 2016) antara lain :

- a. Secara Mikro; kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah;
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan;
- c. Kemiskinan muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal;

Faktor pendapatan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan pola konsumsi rumah tangga. Pendapatan yang semakin tinggi menunjukkan daya beli yang semakin meningkat, dan semakin meningkat pula aksesibilitas terhadap pangan yang berkualitas lebih baik (Sinaga:2017)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasil, dengan data yang di peroleh dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif

atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian diatas, peneliti akan mendeskripsikan tentang seberapa Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, untuk meneliti pengaruh produksi beras, konsumsi beras dan kemiskinan terhadap indeks ketahanan pangan dari Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan data sekunder. Dan jenis data yang digunakan adalah Data Panel. Objeknya adalah Provinsi Sulawesi Utara.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan yang telah disusun dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu yang bersumber dari laporan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan lain-lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data panel (pool data). Dikarenakan pada penelitian ini menggunakan data jenis time series dan juga cross section. Agar lebih akurat dalam melakukan analisisnya, maka dari itu teknik analisis data panel digunakan. Menurut Gujarati (2003) menyatakan bahwa data panel yaitu gabungan dari data time series (antar waktu) dan data cross section (antar individu dan ruang). Alat pengolahan data yang digunakan yaitu menggunakan software Microsoft Excel, SPSS 22.

Data yang di kumpulkan pada penelitian ini yakni ;

- a. Data Produksi Beras pada 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur tahun 2016-2019 (Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara);
- b. Data Konsumsi Beras pada 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur tahun 2016-2019 (Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara);
- c. Data persentase Kemiskinan pada 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur tahun 2016-2019 (Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara);
- d. Data Indeks Ketahanan Pangan pada 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur tahun 2016-2019 (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Data yang digunakan dalam model penelitian ini akan disajikan pada lampiran. Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Produksi Beras (X_1) adalah jumlah produksi beras masing-masing Kabupaten sampel di Propinsi Sulawesi Utara yang diukur dalam satuan ton per tahun.
- Konsumsi Beras (X_2) adalah jumlah konsumsi beras masing-masing Kabupaten sampel di Propinsi Sulawesi Utara yang diukur dalam satuan ton per tahun.
- Tingkat kemiskinan (X_3) adalah jumlah penduduk miskin masing-masing kabupaten sampel di Provinsi Sulawesi Utara yang diukur dalam satuan persen per tahun.
- Indeks Ketahanan Pangan (Y) adalah nilai atau indikator untuk mengukur tingkat ketahanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk masing-masing kabupaten sampel di provinsi Sulawesi Utara dengan skala 0-100.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel 2013* dan *SPSS 22*.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel *Independent* (variabel bebas atau X terhadap variabel *dependent* (variabel terikat atau Y).

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*). Model analisis regresi berganda sebagai berikut

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

| | |
|----------|---------------------------|
| Y | = Indeks Ketahanan Pangan |
| X_1 | = Tingkat Produksi Beras |
| X_2 | = Tingkat Konsumsi Beras |
| X_3 | = Tingkat Kemiskinan |
| α | = Konstanta/ Intercept |
| β | = Koefisien Regresi |
| e | = Standar Error |

Metode kuadrat terkecil/*Ordinary least square* merupakan estimasi titik sampel, karena itu masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interal estimasi maupun uji hipotesis melalui uji t. dengan menggunakan table distribusi t kita mendapatkan nilai t kritis (t_c) dengan signifikansi $t_{\alpha/2}$ dan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 3) Nilai koefisien X_2 sebesar 9.201 artinya jika terjadi peningkatan konsumsi beras (X_2) maka indeks ketahanan pangan (Y) akan meningkat sebesar 9.201. Dengan nilai t hitung $1.460 > t$ tabel 1.309. Artinya, secara signifikan berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangan.
- 4) Nilai koefisien X_3 sebesar -0.729 artinya jika terjadi kenaikan tingkat kemiskinan (X_3) maka indeks ketahanan pangan (Y) akan turun sebesar 0.729. Dengan nilai t hitung $-1.622 < t$ tabel 1.309. Artinya, secara tidak signifikan berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangan.

Tabel 2
Uji Determinant R Square

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,616 ^a | ,380 | ,313 | 6,24244 |

a. Predictors: (Constant), x_3 , x_2 , x_1

Sumber: Hasil Olahan SPSS 22

Dari nilai determinan R menunjukkan nilai sebesar $0.380 = 38\%$. Artinya, bahwa variable indeks ketahanan pangan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variable produksi beras, konsumsi beras dan tingkat kemiskinan adalah sebesar 38% dan sisanya di pengaruhi oleh factor-faktor lain di luar model.

Tabel 3
Uji F Statistik
ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 668,011 | 3 | 222,670 | 5,714 | ,004 ^b |
| | Residual | 1091,105 | 28 | 38,968 | | |
| | Total | 1759,115 | 31 | | | |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), x_3 , x_2 , x_1

Sumber: Hasil Olahan SPSS 22.

Nilai F hitung sebesar 5.714. Nilai F table 5% dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator ($k-1/3-1=2$) dan df untuk denominator ($n-k/32-3=29$) maka diperoleh nilai f table 3.33. Nilai F hitung $5.714 > F$ table sebesar 3.33. Artinya secara bersama-sama variable produksi beras, konsumsi beras dan tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangan

Pembahasan

Ketahanan pangan merupakan hak asasi manusia (HAM). Setiap orang berhak memperoleh makanan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Pangan merupakan salah satu kebutuhan

dasar dan terpenting bagi manusia sehingga pemenuhannya menjadi salah satu hak asasi manusia, tidak dapat ditunda dan juga tidak dapat disubsitusikan dengan bahan lain. Pangan juga merupakan komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta sebagai pilar untuk pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik suatu negara yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya.

Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Menurut Badan Pusat Statistik “Sebagai bahan pangan pokok, beras merupakan penyumbang paling tinggi pada inflasi. Selama 2010, kontribusi beras terhadap inflasi 1,29 persen dari total 6,96 persen. Artinya, beras menyumbang 18,5 persen mendekati 19 persen dari total inflasi”.

Bagi Indonesia termasuk di dalamnya Propinsi Sulawesi Utara, pangan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti naiknya harga beras pada waktu krisis ekonomi tahun 1997/1998 yang berkembang menjadi krisis multidimensi telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dimana pentingnya ketahanan pangan pada ekonomi maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari konsumsi beras, produksi beras dan tingkat kemiskinan pada Indeks Ketahanan Pangan agar dapat berguna sebagai salah satu kriteria dalam pengambilan keputusan guna tercapainya Ketahanan Pangan yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Selanjutnya, Nilai strategis dari beras disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri pengolahan beras memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi, yakni dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan dan sebagai wage good, dalam bidang lingkungan, yakni menjaga tataguna air dan kebersihan udara, dan di bidang sosial politik yakni sebagai perekat bangsa dan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa produksi beras dan berpengaruh positif dan signifikan dengan Indeks Ketahanan Pangan di Sulawesi Utara dalam hal ini di 8 Kabupaten yang menjadi sampel. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Denny Arianto (2010) yang memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu metode analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan membandingkan perilaku ketersediaan beras di tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari hasil regresi diketahui bahwa luas panen dan rata-rata produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio ketersediaan beras. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketersediaan beras adalah sangat penting, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri dan ditopang dengan tambahan impor. Pertimbangan ini menjadi semakin penting karena jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan sebaran populasi yang cukup luas. Untuk itu, guna memenuhi

kebutuhan pangan penduduknya, diperlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar yang memenuhi kecukupan konsumsi.

Hasil berikutnya dari penelitian ini adalah variabel konsumsi beras berpengaruh positif dan signifikan dengan Indeks Ketahanan Pangan. Hasil ini didukung juga dari penelitian sebelumnya dari Mahdalena (2014) yang mengatakan bahwa ketersediaan beras di Sumatera Utara secara parsial dipengaruhi oleh harga beras domestik, harga kedelai domestik, konsumsi beras, dan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, dan secara parsial tidak dipengaruhi oleh harga beras impor dan luas panen jagung.

Undang-Undang pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan Kedaulatan Pangan (*food sovereignty*), yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan menentukan sistem pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal; Kemadirian Pangan (*food resilience*), yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam di dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai pada perseorangan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta kearifan lokal secara bermartabat, dan Keamanan Pangan (*food safety*), yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Joseph (2017) menunjukkan pola konsumsi masyarakat di Sulawesi Utara sebagian besar ada pada kelompok pangan padi-padian, yaitu sebesar 1.166,9 kkal/kapita/hari dari total Angka Kecukupan Energi (AKG) masyarakat Sulawesi Utara sebesar 2.021 kkal/kapita/hari. Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat di Sulawesi Utara masih sangat tergantung pada beras sebagai bahan pangan pokok. Selanjutnya dengan adanya pertambahan penduduk cukup signifikan, maka ini akan berdampak pada permintaan beras yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan produksi beras serta menetapkan cadangan pangan yang tepat sehingga kedepannya tidak terjadi kekurangan.

Hal lain yang berkaitan dengan konsumsi adalah bahwa pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (lebih dari 50% dari jumlah pengeluaran). Ini berkaitan juga dengan tingkat kemiskinan, yang mana bahwa rumah tangga yang tergolong miskin akan memberikan porsi lebih besar dalam pengeluarannya untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Pengujian variabel ketiga yaitu pengaruh kemiskinan terhadap indeks ketahanan pangan pada penelitian ini diperoleh hasil yaitu kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Ketahanan Pangan. Hasil ini juga didukung hasil penelitian sebelumnya dari Zakiah (2016) yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum daerah dengan garis kemiskinan rendah mempunyai konsumsi energi lebih rendah dibandingkan daerah dengan garis kemiskinan lebih tinggi, yang berarti masyarakat dengan ekonomi lebih rendah tidak tahan pangan. Ini jika angka tingkat kemiskinan semakin meningkat maka indeks ketahanan pangan akan semakin rendah.

Selanjutnya secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut yaitu produksi beras, konsumsi beras dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Ketahanan Pangan di propinsi Sulawesi Utara. Ini sejalan dengan program pemerintah propinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pangan Daerah untuk tetap memantau ketersediaan pasokan pangan beras serta tersedianya pangan di pasaran yang beragam, seimbang dan bergizi untuk dikonsumsi masyarakat. Dan dalam hal pengentasan kemiskinan, melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) diantaranya menjaga kestabilan harga barang, meningkatkan ekspor, melakukan promosi potensi sumber daya di Sulawesi Utara untuk menarik para investor, harga komoditi pertanian di Sulawesi Utara (cengkih, pala dan kopra) yang terus membaik, pembangunan Rumah Sakit Daerah, dan lain sebagainya, diharapkan mampu menjawab tantangan ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi beras yang ada di 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolmut, Bolsel dan Boltim berpengaruh positif signifikan terhadap indeks ketahanan pangan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi beras yang ada di 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur berpengaruh positif signifikan terhadap indeks ketahanan pangan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang ada di 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks ketahanan pangan.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi beras, konsumsi beras dan tingkat kemiskinan yang ada di 8 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur secara simultan berpengaruh positif dan signifikan pada indeks ketahanan pangan.

Saran

1. Perlu adanya terobosan-terobosan baru melalui program dan kegiatan dari pemerintah untuk menjaga produksi dan kualitas panen sehingga ketersediaan pangan pokok yaitu beras tetap dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Utara.

2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat bekerjasama dan atau mengikutsertakan BUMN serta pihak swasta yang terkait untuk turut serta peduli dan memberikan bantuan seperti pelatihan khusus petani, permodalan, alat-alat pertanian serta diversifikasi pangan.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui instansi terkait diharapkan terus dapat memantau dan menjaga kestabilan harga beras lokal dan mengedukasi masyarakat perihal pola konsumsinya untuk tidak sepenuhnya bergantung pada jenis pangan padi-padian dalam memenuhi kebutuhan gizi (karbohidrat). Perlu adanya panganekaragaman pangan seperti umbi-umbian dan lain-lain diluar beras namun tetap memperhatikan nilai gizi dan keamanan dari bahan pangan tersebut.
4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih lagi meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada dalam hal pengentasan kemiskinan melalui program-program baru yang pro rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Prasetyo. 2011. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten karanganyar dilihat dari Rasio Pendapatan Daerah pada APBD 2006-2008. Skripsi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Baliwati, Y. F, dkk. 2004. Pengantar Pangan dan Gizi. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Denny Arianto (2010) Analisis Pengaruh Stok Beras, Luas Panen, RataRata Produksi, Harga Beras, dan Jumlah Konsumsi Beras Terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Tengah.
- Gujarati, Damodar, 2003, Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Joseph, H, Gabriel, 2017. Analisis Pola Konsumsi Pangan di Propinsi Sulawesi Utara, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Utara, Jurnal Ilmiah Sains, vol. 17 No. 2, Oktober 2017.
- Miller, R.L, dan Meiners E, R. 2000. Teori Mikroekonomika Intermediate, Penerjemahan Haris Munandar. PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahdalena, Wenny L.G. Supriana, Tavi. Lubis, Satria Negara. 2015. FaktorFaktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Beras dan Jagung di Provinsi Sumatra Utara. Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara,
- Oxfam. 2001. The Impact of Rice Trade Liberization on Food Security in Indonesia. A study conducted for Oxfam – Great Britain.
- Riyadi H. 2003. Penilaian Gizi Secara Antropometri. Bogor: Departemen Gizi dan Masyarakat. Salemba Medika, Jakarta.
- Rosyidi, Suherman, 2020, Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert Pindyck & Daniel L. Rubinfeld. 2007. Mikroekonomi edisi keenam. Indeks: Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2002. Makro Ekonomi Modern, P.T.Rajawali Grafindo Persada : Jakarta.
- Sartika, Cica, Balaka, Yani, M, Rumbia, Aya, Wali, 2016. Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, Jurnal Ekonomi, vol.1, April 2016.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA

Widiarsih, Dwi, 2012. Pengaruh Sektor Komoditi Beras Terhadap Inflasi Bahan Makanan, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun II, No. 6, Juli 2012.

Zakiah (2016) Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Aceh

